BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan sekolah swasta di Indonesia dilakukan oleh beragam pihak. Dalam wadah Musyawarah Perguruan Swasta didapati sekolah-sekolah yang berlatarbelakang keagamaan, kebudayaan/kedaerahan, sekolah yang diselenggarakan oleh organisasi wanita, dan sekolah yang merupakan bagian dari suatu organisasi besar dengan beragam latar belakang pula (Siagian, 1986).

Pengakuan hukum atas pentingnya keberadaan sekolah swasta, tersirat di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 54 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa: "peran serta dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan". Selain itu, ditandaskan pula dalam Pasal 55 ayat (1), bahwa "masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat".

Sekolah swasta berkembang cukup pesat. Jumlah sekolah swasta berbanding sekolah negeri adalah sebagai berikut: TK 42.667: 230; SD 9.861: 136.332; SLTP 9.832: 11.244; dan SMA 4.699: 3.014. Sedangkan persentase murid sekolah swasta, 98,83% di TK; 7,68% di SD, 36,77% di SLTP; dan 43,29% di SMA (Supriadi, 2003). Sungguhpun demikian, perkembangan jumlah sekolah swasta tidak selalu selaras dengan peningkatan mutunya. Keadaan ini dapat dijelaskan

oleh beragamnya motivasi penyelenggaraan sekolah swasta yang menyebabkan kelebihan-potensialnya tidak selalu menunjukkan kesamaan dalam kemampuan dan ikhtiar perbaikan mutu pendidikan antarsekolah swasta.

Bagi sekolah swasta, pentingnya meningkatkan mutu pendidikan terkait dengan sekurang-kurangnya tiga alasan kritis berikut ini. *Pertama*, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional semakin luas, sementara pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dari hari ke hari semakin luas pula jangkauannya. Dengan demikian, perguruan swasta dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan mutu dan mengembangkan keunggulannya sehingga tetap menjadi pilihan bagi sebagian besar peserta didik (Djojonegoro, 1996).

Kedua, pendidikan merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat sekaligus paling disoroti oleh masyarakat. Dalam pandangan Suryadi (1995), hampir seluruh anggota masyarakat berkepentingan untuk memperoleh kejelasan mengenai peningkatan fasilitas pendidikan, produktivitas sekolah, kiprah sekolah dalam memeratakan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh warga negara, dan derajat kesesuaian antara kemampuan bekerja lulusan dengan bidang keterampilannya.

Ketiga, krisis pendidikan yang dihadapi dewasa ini berkisar pada krisis manajemen. Kulminasi dari keseluruhan masalah manajemen tersebut adalah masih rendahnya mutu pendidikan kita (Tilaar, 1994). Secara objektif, sistem pendidikan kita sudah mengalami krisis mutu yang berkepanjangan paling tidak sejak pertengahan tahun 1970-an (Suryadi, 1998). Angka putus sekolah di tingkat SD 2,99%; SLTP 3,47%; SMA 4,6%; dan SMK 6,08%. Keadaan ini,

menurut Suryadi, relatif bertahan dan tidak banyak berkurang dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

Dengan anggapan bahwa NEM yang diperoleh murid merupakan alat ukur yang representatif setidak-tidaknya untuk mutu keluaran pendidikan, maka perolehan NEM yang rendah dapat pula dianggap sebagai penjelasan atas rendahnya mutu pendidikan di sekolah. Angka-angka NEM yang rendah, menurut Achmady (1995), menunjukkan masih rendahnya tingkat-penguasaan peserta didik terhadap tugas-tugas belajar (*learning tasks*) yang dituntut oleh kurikulum.

Terkait dengan fakta dan anggapan di atas, observasi awal yang penulis lakukan menemukan bahwa mutu pendidikan SMA-SMA swasta Islam di Provinsi Jawa Tengah relatif tertinggal dibanding SMA-SMA swasta lainnya. Dinas Pendidikan di provinsi tersebut (Laporan Ebtanas 1998/1999) mempertelakan, dari 110 SMA yang tergolong ke dalam 100 SMA terbaik dalam perolehan NEM individual murid, terdapat 19 SMA swasta (program IPA) dan 12 SMA swasta (program IPS). Baik program IPA maupun IPS, peringkat pertama ditempati oleh SMA Taruna Nusantara, peringkat di bawahnya adalah SMA-SMA Katolik dan sebagian kecil SMA Islam.

Dari 114 murid yang tergolong 100 murid terbaik dalam perolehan NEM, 59 orang di antaranya berasal dari SMA Swasta (Taruna Nusantara, NEM tertinggi 60,63 di peringkat 1 dan NEM terendah 53,75 di peringkat 100). Kemudian, terdapat 40 murid SMA negeri (NEM tertinggi 56,86 di peringkat 16, dan terendah 53,80 di peringkat 97); murid SMA swasta lainnya berjumlah 15

orang (NEM tertinggi 57,99 di peringkat 6, dan terendah 53,76 di peringkat ke 99).

Selanjutnya, observasi awal penulis terhadap suasana akademik (khususnya dilihat dari upaya guru dan motivasi murid di dalam proses pembelajaran) SMA swasta di Kota Tegal, menginformasikan bahwa SMA swasta Islam di kota tersebut umumnya tergolong ke dalam tipe sekolah perpaduan antara derajat motivasi murid rendah sampai cukup dengan pelayanan guru tinggi. Keadaan demikian tidak terlepas dari tradisi penerimaan dan preferensi murid baru selama ini, yang cenderung memperlakukan SMA swasta Islam sebagai pilihan kedua setelah SMA lain yang mereka anggap favorit.

Dalam kerangka agenda reformasi pendidikan sebagaimana diidentifikasi oleh Zamroni (2000), perbaikan mutu pendidikan terkait dengan dimensi-dimensi fondasional kultural, politik-kebijakan, teknis operasional, dan kontekstual. Esensi reformasi pendidikan pada dimensi kultural adalah mengembangkan norma baru tentang peran dan perilaku, dan mengembangkan serta membiasakan sistem kolaborasi dalam proses pembelajaran.

Tuntutan peningkatan mutu dan reformasi segi kultural dalam pendidikan di sekolah swasta, mengisyaratkan dua hal penting. *Pertama*, perlunya kehadiran kepala sekolah yang memiliki kapasitas kepemimpinan sebagai pengembang budaya organisasi sekolah. *Kedua*, perlunya pengembangan budaya organisasi sekolah yang berorientasi perbaikan mutu secara berkelanjutan.

Setiap usaha perbaikan mutu pendidikan di sekolah, menurut Gaffar (1995), peran kepala sekolah dengan segenap jajarannya amat penting.

Kemampuan manajemen pada tingkat satuan pendidikan, ikut menentukan keseluruhan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Kemampuan manajemen ini amat ditentukan oleh kemampuan manajerial kepala sekolah.

Kepala SMA swasta di Indonesia berjumlah 5.020 orang, yang terdiri atas PNS dipekerjakan sebanyak 1.505 dan tetap yayasan 3.515 orang (*http://www.pdk.go.id*, diakses 2003). Diperinci berdasarkan ijazah tertingginya, sebagian besar Kepala SMA swasta di Indonesia berijazah Sarjana (Keguruan 2.932 orang; 476 Nonkeguruan). Selain itu, terdapat pula yang berlatarbelakang D2 (159 orang); D3 (Keguruan 198 orang, Nonkeguruan 82 orang); Sarjana Muda (Keguruan 792 orang, Nonkeguruan 311 orang); dan Pascasarjana 70 orang. Untuk PNS yang dipekerjakan sebagai Kepala SMA Swasta, rata-rata golongannya ialah Golongan III (974 orang) dan Golongan IV (531 orang).

Kenyataan di lapangan menunjukkan, para kepala sekolah tidak memiliki cukup keberanian manajerial untuk memilih alternatif-alternatif yang lebih baik dalam mengambil keputusan; mereka merasa kekurangberhasilan sekolahnya seolah-olah bukan menjadi tanggung jawabnya (Wongkar sebagaimana dikutip Suderadjat, 1997).

Berkenaan dengan aspek-aspek kekepalasekolahan di SMA swasta Islam di daerah penelitian, observasi pendahuluan yang penulis lakukan menemukan fakta berikut ini. *Pertama*, proses rekrutmen kepala sekolah dilakukan melalui beragam jalur, yaitu kiriman dari pemerintah berupa PNS kependidikan yang diperbantukan (dpk) sebagai kepala SMA swasta, guru dpk yang diangkat –atas restu pemerintah– menjadi kepala sekolah oleh yayasan atau badan penyelenggara, guru tetap yayasan yang diangkat menjadi kepala sekolah oleh

yayasan, dan pensiunan guru atau kepala sekolah negeri yang "dimohon" oleh yayasan untuk mengepalai SMA swasta. Beragam jalur rekrutmen kepala sekolah tersebut dibingkai oleh ciri yang sama, bahwa mereka tidak dipersiapkan secara khusus melalui pembekalan kompetensi kekepalasekolahan yang memadai.

Kedua, pengelolaan pendidikan SMA swasta Islam berlangsung dalam suasana kebijakan yang sedang bergeser dari kebijakan pendidikan sentralistik menuju otonomi. Sisa-sisa tradisi kebijakan pendidikan sentralistik yang berupa pembinaan pemerintah, telah mengakibatkan hampir seluruh mekanisme pengelolaan pendidikan di SMA swasta Islam disamaratakan oleh Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana yang diberlakukan untuk SMA negeri.

Kondisi demikian mempersyaratkan kepemimpinan kepala sekolah yang berkemampuan mengembangkan budaya organisasi sekolah swasta. Pentingnya pengembangan budaya organisasi ditopang oleh sekurang-kurangnya dua alasan berikut ini. *Pertama,* budaya organisasi sebagai salah satu subkomponen dari profil kapabilitas manajemen, memuat unsur-unsur: (a) sikap organisasi terhadap perubahan; (b) preferensinya terhadap risiko; (c) perspektif waktu; dan (d) perspektif tindakan (Ansoff dan Mc. Donnell, 1990).

Kedua, apabila dikaitkan dengan implementasi kebijakan otonomi pendidikan (di dalam kebijakan mana sekolah swasta dianggap mewakili model pengelolaan sekolah otonom yang sesuai dengan konsep MBS), maka pengembangan budaya organisasi sekolah swasta mengandung makna perubahan yang mendasar dalam bidang-bidang perilaku pelayanan

pendidikan di sekolah; dan efektivitas pendidikan berdasarkan budaya sekolah (Turney, 1992). Efektivitas pendidikan dari segi budaya organisasi sekolah mengisyaratkan bahwa apapun gaya kepemimpinan yang dilaksanakan, hendaknya memberi prioritas yang tinggi terhadap pengembangan kerja sama, kesepakatan mengenai norma, kepercayaan, dan pengertian yang didikembangkan sekolah sehingga semua kelompok mampu memberdayakan *outcomes* pendidikan.

B. IDENTIFIKASI, POKOK MASALAH, DAN PERTANYAAN PENELITIAN

Hasil observasi pendahuluan menggambarkan disparitas mutu keluaran SMA swasta yang cukup lebar. Di daerah penelitian, terdapat sejumlah kecil sekolah swasta yang secara akademik tergolong unggul di tengah-tengah sejumlah besar sekolah swasta --termasuk SMA swasta Islam-- yang tergolong tertinggal.

Di sekolah swasta, tak terkecuali SMA swasta Islam di daerah penelitian, hakikat reformasi pendidikan dalam dimensi kultural belum dimaknai sebagai ikhtiar meniadakan faktor-faktor yang tidak menguntungkan sekolah, seperti rendahnya kreativitas dan inisiatif, kepemimpinan kepala sekolah bergaya komando, dan budaya sekolah yang tidak kondusif untuk mencapai prestasi (sarat persaingan, kurang kerja sama, tidak terbuka, guru terlalu dominan, murid kurang aktif, kurang disiplin dan belajar keras).

Dengan ungkapan lain, sejauh ini kepemimpinan kepala sekolah swasta di daerah penelitian belum ditampilkan secara optimal baik ke dalam kemampuan menciptakan iklim kondusif bagi perubahan dan inovasi, maupun dalam

kapasitas manajerial dan kesanggupan melaksanakan misi profesional administrator pendidikan sesuai dengan persyaratan ambang kinerja kepemimpinan kepala sekolah.

Identifikasi di atas mengantarkan penulis kepada kata kunci permasalahan penelitian yang meliputi: (1) kepemimpinan kepala sekolah; dan (2) kemampuan mengembangkan budaya organisasi; dalam kerangka pemenuhan tuntutan (3) perbaikan mutu pendidikan. Pokok masalah penelitian yang dapat penulis rumuskan ialah: bagaimanakah fungsionalisasi kepemimpinan pendidikan oleh kepala sekolah dalam mengembangkan budaya organisasi sekolah dan memperbaiki mutu pendidikan di SMA swasta Islam; dan model konseptual kepemimpinan pendidikan yang bagaimanakah yang dianggap adaptif dilihat dari kebutuhan pengembangan budaya organisasi sekolah dan perbaikan mutu pendidikan di SMA swasta Islam?

Demi kebulatan informasi yang mewakili model empirik kepemimpinan kepala sekolah, budaya organisasi, dan mutu pendidikan SMA swasta Islam itu, selanjutnya pokok masalah tersebut di atas penulis perinci ke dalam pertanyaan penelitian berikut ini.

1. Faktor-faktor organisasional manakah yang mendasari kemampuan kepemimpinan kepala SMA swasta Islam? Pertanyaan ini difokuskan kepada aspek-aspek: visi organisasi, etos kerja, dan sumber kekuasaan kepala SMA swasta Islam.
2. Bagaimanakah upaya kepala SMA swasta Islam dalam mengembangkan budaya organisasi dan memprakarsai perbaikan mutu pendidikan di sekolah? Pertanyaan ini diarahkan kepada pengungkapan: isu, krisis

utama, dan tindakan strategik kepala sekolah dalam konteks pasang-surut kehidupan sekolah baik sebagai organisasi maupun entitas budaya; dan ikhtiar perbaikan mutu komponen sistem pendidikan di sekolah.

3. Bagaimanakah kapasitas kepemimpinan kepala SMA swasta Islam dalam dimensi-dimensi keterampilan manajerial, misi profesional pengelola satuan pendidikan, dan rutinitas pelaksanaan tugas manajerial di sekolah.
4. Bagaimanakah kondisi budaya organisasi yang dikembangkan oleh kepala SMA swasta Islam? Pertanyaan ini merujuk kepada aspek-aspek:
   (a) ragam nilai yang bersumber dari agama, diderivasi ke dalam visi organisasi badan penyelenggara dan selanjutnya ditransformasi menjadi nilai budaya organisasi sekolah;
   (b) persepsi warga sekolah mengenai kondisi budaya organisasi sekolah dilihat dari perspektif konsep nilai-nilai pembeda budaya organisasi dan konsep pengukuran budaya organisasi;
5. Aspek-aspek mutu pendidikan manakah yang meningkat secara konsisten sebagai produk aktualisasi kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan budaya organisasi SMA swasta Islam? Aspek-aspek mutu pendidikan dalam pertanyaan ini meliputi: (a) masukan; (b) proses; (c) dan keluaran.
6. Bagaimanakah model konseptual kepemimpinan pendidikan yang mencerminkan hubungan fungsional dengan pengembangan budaya organisasi dan perbaikan mutu pendidikan SMA swasta Islam? Pertanyaan ini merujuk kepada kemungkinan meracik elemen-elemen kontekstual yang ditemukan di lapangan dengan elemen-elemen

konseptual yang diberangkatkan dari refleksi teoretik, seperangkat asumsi, hasil penelitian terdahulu, dan sejumlah kondisi aktual yang seharusnya direspons oleh sekolah swasta Islam, sekurang-kurangnya di daerah penelitian.

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan menggali dan menghimpun informasi empirik yang dapat menggambarkan kepemimpinan kepala SMA swasta Islam, terutama dalam hubungannya dengan kemampuan mengembangkan budaya organisasi dan memperbaiki mutu pendidikan. Secara rinci, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memperoleh gambaran empirik kepemimpinan kepala SMA swasta Islam, terutama dilihat dari aspek-aspek: (a) faktor-faktor organisasional yang mendasari kemampuan kepemimpinan kepala SMA swasta Islam, yaitu visi organisasi, etos kerja, dan sumber kekuasaan; (b) upaya kepala SMA swasta Islam dalam mengembangkan budaya organisasi dan memprakarsai perbaikan mutu pendidikan di sekolah; (c) kapasitas kepemimpinan kepala SMA swasta Islam dalam dimensi-dimensi keterampilan manajerial, misi profesional pengelola satuan pendidikan, dan rutinitas pelaksanaan tugas manajerial di sekolah.
2. Memahami budaya organisasi sekolah yang dikembangkan atas upaya kepala SMA swasta Islam, dengan cakupan: (a) ragam nilai yang bersumber dari agama, yang diderivasi ke dalam visi organisasi badan penyelenggara dan selanjutnya ditransformasi menjadi nilai budaya organisasi sekolah; (b) persepsi warga sekolah mengenai kondisi budaya

organisasi sekolah dilihat dari perspektif konsep nilai-nilai pembeda budaya organisasi dan konsep pengukuran budaya organisasi;

3. Mengetahui upaya perbaikan dan derajat kebermutuan pendidikan SMA swasta Islam, yang meliputi sub-sub: (a) masukan; (b) proses; dan (c) keluaran.
4. Menawarkan model konseptual kepemimpinan pendidikan yang secara fungsional mampu mengembangkan budaya organisasi dan memperbaiki mutu pendidikan SMA swasta Islam.

D. KEGUNAAN HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai guna baik secara teoretik maupun kepentingan praktik administrasi pendidikan.

1. Secara teoretik, hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memperkaya hasil penelitian terdahulu yang berkenaan dengan profil kepemimpinan kepala sekolah swasta, kebermutuan pendidikan, dan nilai-nilai budaya organisasi sekolah swasta yang proaktif terhadap tuntutan perbaikan mutu pendidikan.
2. Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan dapat diperlakukan sebagai salah satu umpan balik bagi Depdiknas, Badan Penyelenggara Sekolah Swasta, dan berbagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberdayaan kinerja kepala sekolah, guna merumuskan kebijakan dan program-program akreditasi sekolah swasta, profesionalisasi kepala sekolah swasta, dan peningkatan kapabilitas manajemen sekolah swasta.

E. ASUMSI-ASUMSI PENELITIAN

Penelitian mengenai kepemimpinan kepala sekolah, budaya organisasi, dan mutu pendidikan sekolah swasta Islam ini didasarkan atas asumsi-asumsi berikut berikut ini. *Pertama,* peningkatan mutu dan kepemimpinan pendidikan harus dilihat sebagai inti revitalisasi kekhasan dan keunggulan sekolah swasta. Di dalam kerangka revitalisasi itu, diperlukan suatu proses pengembangan budaya organisasi yang mendukung.

Prinsip-prinsip kerja seperti peningkatan mutu yang berkelanjutan, kemandirian, kepuasan pelanggan, dan sebagainya, hanya mungkin dikembangkan secara operasional di dalam budaya organisasi yang memuat nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip kerja itu. Demikian pula halnya dengan konsep-konsep dan kebijakan terakhir dalam pengelolaan pendidikan seperti MBS, pada hakikatnya dapat dijalankan dengan baik di dalam suasana kerja satuan pendidikan yang secara kultural telah menyediakan nilai-nilai pendukung MBS. Dengan demikian, secara akademik dan dalam kerangka ilmu administrasi pendidikan, penelaahan budaya organisasi menjadi penting untuk dilakukan.

Kedua, urgensi budaya organisasi sebagai bahan penelaahan administrasi pendidikan dapat diterangkan dengan argumen bahwa sekolah sebagai organisasi sekaligus entitas budaya. Dalam pandangan teori sistem sosioteknik, sekolah adalah organisasi terbuka sehingga memiliki konsekuensi tambahan yang lebih kompleks daripada organisasi tertutup. Sebagai organisasi terbuka, sekolah dipengaruhi oleh dua kekuatan eksternal yang sangat menentukan struktur internalnya.

Teori sistem sosioteknik memandang organisasi pendidikan sebagai struktur yang secara internal merupakan unikum tersendiri, dan pada saat yang bersamaan ia pun merupakan bagian interaksi dengan suprasistem yang melingkupinya. Konsekuensi keberadaan sekolah sebagai organisasi terbuka adalah kesediaan untuk berubah ke arah yang makin membaik. Secara kultural, konsekuensi itu diisyaratkan dalam pernyataan Sanusi (1991), bahwa peningkatan dalam besarnya organisasi dan usaha pendidikan, akan meminta perubahan-perubahan mendasar pada semua segi dan tingkat administrasinya serta peningkatan dalam kemampuan teknik-manajerial para pejabatnya.

Ketiga, sebagai salah satu subkomponen dari profil kapabilitas manajemen, budaya organisasi memuat unsur-unsur:

(a) sikap organisasi terhadap perubahan, apakah bermusuhan, pasif, atau mudah dipengaruhi perubahan.
(b) preferensinya terhadap risiko, sebagai kelompok apakah mereka menghindari risiko, toleran atau mencarinya, yaitu hanya menginginkan risiko yang sudah biasa atau mencari risiko yang penuh romantika.
(c) perspektif waktu, apakah manajemen melihat masalah dengan percaya pada sejarah masa silam, lebih ingin menanganinya sesuai dengan kondisi sekarang, atau lebih melihat ke masa depan.
(d) perspektif tindakan, apakah perhatian dan energi organisasi dipusatkan pada operasi internal atau pada lingkungan eksternal (Ansoff dan Mc. Donnell, 1990)

Keempat, pengembangan budaya organisasi dan perbaikan mutu pendidikan mengandung makna dan senafas dengan konteks strategi transformasi budaya untuk mutu. Manajemen mutu menjadi bagian penting dari keseluruhan aspek transformasi budaya yang dimaksud. Bahkan sistem sosial budaya itu menempati peran yang dominan (McLaughlin, 1995).

F. KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN

Istilah kerangka konseptual (Miles & Huberman, 1992) identik dengan kerangka berpikir atau paradigma, yang memiliki peranan sebagai *theoretical perspective*; *a systematic sets of beliefs*; penetapan *boundaries of study* (Lincoln & Guba, 1985); dan penetapan itu berfungsi sebagai *theoretical leads* dalam menemukan dan mengembangkan *hipotesis baru* dan proposisi mengenai apa yang dilihat dan didengar (Schatman & Strauss, 1973).

Berdasarkan pengertian di atas, kerangka konseptual penelitian ini dibangun dengan maksud melakukan eksplorasi dan konfirmasi di tingkat empirik mengenai tindakan kepemimpinan kepala sekolah, ciri-ciri budaya organisasi sekolah, dan kebermutuan pendidikan di SMA swasta berciri khas Islam. Tampilan aspek-aspek termaksud, diidentifikasi dari hubungan fungsional antara kepemimpinan kepala sekolah dengan budaya organisasi sekolah dan mutu pendidikan di sekolah.

Kategori informasi mengenai kepemimpinan kepala sekolah mencakup faktor-faktor organisasional (visi, etos kerja, dan sumber kekuasaan) pembentuk kemampuan kepemimpinan kepala sekolah; kemampuan mengembangkan budaya sekolah; kapasitas manajerial dan misi profesional kepala sekolah.

Kategori informasi mengenai budaya organisasi sekolah meliputi nilai-nilai yang diderivasi dari tuntunan Islam ke dalam budaya organisasi penyelenggara sekolah (Perhimpunan Al-Irsyad), dan ditransformasi menjadi nilai-nilai budaya sekolah; aspek-aspek kekuatan dan kohesivitas budaya organisasi sekolah yang dipersepsikan oleh warga sekolah. Kategori iniformasi ini dikonsepsikan sebagai profil budaya organisasi sekolah sebagai produk kepemimpinan kepala sekolah.

Sedangkan kategori informasi mengenai kebermutuan pendidikan di sekolah meliputi aspek-aspek upaya strategik yang ditempuh sekolah dalam memperbaiki mutu pendidikan; derajat mutu subsistem-subsistem masukan, proses, dan keluaran pendidikan. Kebermutuan pendidikan di sekolah, dalam penelitian ini dipahami sebagai resultan dari tindakan kepemimpinan kepala sekolah dan budaya organisasi sekolah yang dikembangkan atas prakarsa kepala sekolah.

Temuan yang diharapkan dari pengungkapan kategori-kategori tersebut ialah sebuah model empirik mengenai keunggulan sekolah swasta dilihat dari kepemimpinan kepala sekolah, profil budaya organisasi, dan cakupan mutu pendidikannya. Model empirik tersebut selanjutnya dijadikan dasar pengajuan model konseptual untuk memaksimalkan keunggulan itu. Apabila diperluas dengan bingkai-bingkai teori dan masalah penelitian, kerangka konseptual penelitian ini dapat diringkaskan secara skematik dalam gambar 1. 1.

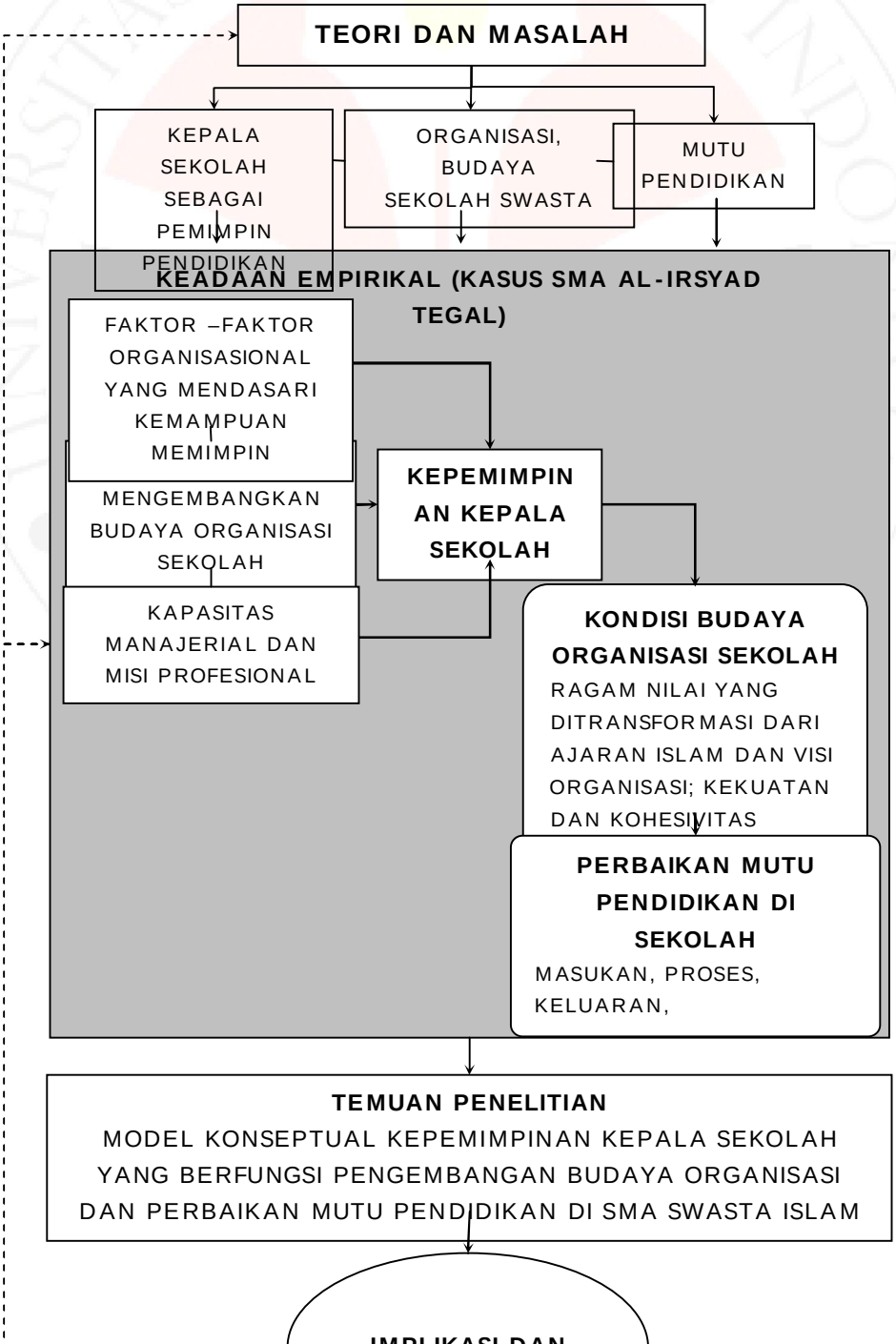
TEORI DAN MASALAH
KEPALA SEKOLAH SEBAGAI PEMIMPIN PENDIDIKAN
ORGANISASI, BUDAYA SEKOLAH SWASTA
MUTU PENDIDIKAN
KEADAAN EMPIRIKAL (KASUS SMA AL-IRSYAD TEGAL)
FAKTOR –FAKTOR ORGANISASIONAL YANG MENDASARI KEMAMPUAN MEMIMPIN
MENGEMBANGKAN BUDAYA ORGANISASI SEKOLAH
KAPASITAS MANAJERIAL DAN MISI PROFESIONAL
KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH
KONDISI BUDAYA ORGANISASI SEKOLAH
RAGAM NILAI YANG DITRANSFORMASI DARI AJARAN ISLAM DAN VISI ORGANISASI; KEKUATAN DAN KOHESIVITAS
PERBAIKAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH
MASUKAN, PROSES, KELUARAN,
TEMUAN PENELITIAN
MODEL KONSEPTUAL KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH YANG BERFUNGSI PENGEMBANGAN BUDAYA ORGANISASI DAN PERBAIKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMA SWASTA ISLAM

Gambar 1.1.
KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN